

ANALISIS IMPLEMENTASI PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN

Uswatun Khasanah^{1*}, Ayunda Putri Nilasari²

^{1,2}Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar Magelang

E-mail: ¹⁾ uswauswet7@gmail.com, ²⁾ ayundaputri@untidar.ac.id

Abstract

Financial Report is a form of accountability for state/regional financial management during a period. If the report provided is correct and in accordance with accounting principles, the report can be called qualified. This research was conducted with the aim of reviewing whether government accounting standards have an effect on the resulting financial reports. This research used the literature review method or is called a literature study. This method was carried out by researching, reviewing, describing, and also identifying existing research. The data used in this study was secondary data derived from national scientific articles sourced from Google Scholar. The results of this study indicate that government accounting standards have an effect on the resulting financial reports.

Keywords: Financial Management, Government Accounting Standards, Quality of Financial Statements

Abstrak

Laporan Keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode. Apabila laporan yang disediakan sudah benar dan sesuai dengan prinsip akuntansi maka laporan tersebut dapat disebut berkualitas. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mereview apakah standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap laporan keuangan yang dihasilkan. Penelitian ini menggunakan metode literatur review atau disebut dengan studi pustaka. Metode ini dilakukan dengan cara meneliti, meninjau, menguraikan, dan juga mengidentifikasi penelitian yang sudah ada. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang berasal dari artikel ilmiah nasional yang bersumber dari google scholar. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap laporan keuangan yang dihasilkan.

Kata Kunci: Kualitas Laporan Keuangan, Pengelolaan Keuangan, Standar Akuntansi Pemerintah

1. PENDAHULUAN

Dengan adanya kewajiban pemerintah untuk melaksanakan transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola keuangan di setiap daerah maka instansi pemerintah wajib untuk melakukan pengelolaan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan keuangan yang sudah ditetapkan. Agar tanggung jawab tersebut dapat terpenuhi maka sistem pelaporan keuangan yang diterapkan haruslah tepat, jelas dan juga dapat diukur sesuai dengan prinsip prinsip transparansi yang ada. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah berupa laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran dalam pelaksanaan otonomi

daerah dan penyelenggaraan operasional pemerintah dengan mengeluarkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang sudah memuat berbagai persyaratan dalam menyajikan informasi laporan keuangan yang berkualitas diantaranya relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Menurut Mahmudi dalam kutipan Munira (2022) menyatakan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah pada dasarnya adalah suatu cara untuk melaksanakan pertanggungjawaban pemerintah yang dilakukan untuk rakyat guna menunjukkan hasil dari pengelolaan dana publik berupa pajak, retribusi, maupun transaksi lainnya. Menyampaikan informasi tentang posisi keuangan, arus kas, kinerja keuangan, dan realisasi anggaran suatu substansi pelaporan yang berguna bagi para pemakai pada saat melaksanakan dan memeriksa keputusan tentang alokasi sumber daya merupakan tujuan umum dari laporan keuangan.

Hartanto (2022) menjelaskan memberikan informasi yang berguna bagi para pemakai dalam mengevaluasi akuntabilitas dan memutuskan keputusan ekonomi, sosial, maupun politik merupakan hal yang harus disediakan oleh laporan keuangan pemerintah. Menurut Mahmudi dalam kutipan Rahmawati et al. (2018) menyatakan akuntan publik merupakan tanggung jawab pemerintah guna mengurus sumber daya, melaporkan, dan mengutarakan semua kegiatan yang berhubungan dengan pemakaian sumber daya publik pada pemberi amanat. Pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dapat merealisasikan akuntan publik dikarenakan adanya permintaan dari masyarakat mengenai pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good government governance*)

UU No 17 Th 2003 menjelaskan mengenai Keuangan Negara dan UU No 23 Th 2004 menjelaskan mengenai Pemerintahan Daerah yang mengatur tentang bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan pemerintah. Memaparkan laporan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan merupakan salah satu cara agar transparansi dan akuntabilitas di pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah terlaksana. Suwardjono dalam kutipan Rahmawati et al. (2018) menyatakan informasi yang bisa diambil dari laporan keuangan harus berguna bagi para pengguna, seperti harus mempunyai nilai atau kualitas yang bisa membantu dalam pengambilan sebuah keputusan dan juga mudah dipahami oleh para pengguna.

Dalam menyusun dan melaporkan keuangan pemerintah dibutuhkan beberapa aspek penting SAP merupakan salah satu aspek tersebut. SAP diterapkan supaya laporan yang dihasilkan dapat meningkat kualitasnya baik di dalam pemerintah pusat maupun daerah. LKPD juga dapat meningkat apabila Sistem Informasi Akuntansi di jalankan dengan baik (Antoni, 2014). Standar Akuntansi Pemerintah merupakan standar yang diterapkan oleh pemerintah dinyatakan dalam standar akuntansi sektor publik di dalamnya berisi tentang elemen elemen yang ada pada standar akuntansi.

Ikatan Akuntansi Indonesia menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan yang di mana pada era sekarang ini sudah semakin maju dan berkembang hal tersebut tercapai karena dilakukannya revisi secara berkala mengikuti perkembangan yang ada baik di Indonesia maupun luar negeri. Membahas dan mempelajari mengenai SAP maka akan selalu dibandingkan dengan SAK. SAK dapat menjadi perbandingan apabila terdapat kekurangan didalam SAP. Dikarenakan penerapan SAP dan SAK berbeda maka perbandingan yang dilakukan harus fleksibel. Pada saat menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi sosial dan politik pemerintah menggunakan SAP karena dengan adanya SAP maka laporan yang dihasilkan akan lebih berkualitas.

Para pengawas keuangan daerah menganggap bahwa dengan adanya laporan keuangan berbasis akuntansi maka hal tersebut memberikan pengaruh terhadap bagian pengawasan laporan keuangan pemerintah. Selain itu juga ada beberapa tantangan yang dihadapi salah satunya yaitu keandalan yang bisa dilakukan oleh pihak pengawas pada saat mengungkapkan kewajaran pada laporan keuangan yang disampaikan melalui opini. Hal ini tentu saja diperlukan supaya dapat memperbaiki pengelolaan keuangan daerah. Laporan keuangan pemerintah yang baik bisa dihasilkan melalui penerapan akuntansi yang baik. Hal yang bisa menjamin bahwa laporan keuangan disajikan secara baik dan benar dan juga sesuai dengan SAP yaitu pengawasan yang baik dan juga optimal maka laporan keuangan yang dihasilkan bisa digunakan untuk bahan dalam mengambil keputusan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah.

2. KAJIAN LITERATUR

2.1. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Standar Akuntansi Pemerintah ialah prinsip akuntansi yang dipakai pada saat menyusun dan melaporkan laporan keuangan pemerintah merupakan definisi SAP menurut PP No 71 Th 2010. Dalam merealisasikan good governance pemerintah dapat mempraktikkan standar akuntansi pemerintah sebagai acuan pada saat membuat laporan keuangan daerah. Tersedianya Standar Akuntansi Pemerintah maka laporan keuangan yang disajikan bisa menghasilkan informasi keuangan yang sesuai dan dapat diperbandingkan bagi para pemaku kepentingan (Akhmad et al., 2017). Langelo et al. (2015) menyatakan bahwa di dalam lingkungan pemerintahan pusat maupun daerah dan juga beberapa organisasi pemerintah daerah maupun pusat menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah. Persatuan organisasi harus menyediakan laporan menurut peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya Standar Akuntansi Pemerintah terdapat keterbatasan yang akan ditunjukkan pada semua standar yang akan dipublikasikan dan juga akan diterangkan secara jelas.

Standar Akuntansi Pemerintah ialah salah satu cara supaya kualitas laporan keuangan pada pemerintah di negara Indonesia dapat memperoleh hasil yang lebih baik atau mengalami peningkatan. Pada Standar Akuntansi Pemerintah terdapat tata cara dan juga prinsip pada saat akan menyajikan dan menyusun Laporan Keuangan Pemerintah. SAP adalah dasar yang digunakan pada akuntansi pemerintahan di Indonesia. Pemerintahan yang baik (*good governance*) dapat diciptakan apabila pemerintah memiliki laporan keuangan yang baik. Supaya Laporan Keuangan yang dihasilkan menjadi akuntabel dan transparan maka SAP diterapkan yang sudah diatur dalam Undang-Undang.

Laporan Keuangan, audit pada pemerintahan di daerah maupun pusat, dan juga akuntansi memiliki banyak kebutuhan agar kebutuhan tersebut terpenuhi maka Standar Akuntansi Pemerintah diterapkan. SAP yang diberlakukan haruslah meyakinkan atau terjamin. Pemerintah menerapkan beberapa strategi dalam meningkatkan laporan keuangan diantaranya yaitu proses mengembangkan dari basis menjadi akrual. Dalam proses perkembangan SAP merujuk kepada praktik yang baik

di internasional namun tetap memikirkan keadaan di Indonesia, termasuk peraturan UU dan praktik akuntansi yang diberlakukan, ataupun kondisi SDM.

2.2. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah

Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintah menyatakan bahwa terdapat sebelas PSAP diantaranya yaitu:

- 1) PSAP Nomor 01 Mengenai Penyajian Laporan Keuangan
Basis kas digunakan dalam laporan keuangan pemerintah diterapkan pada pendapatan yang diperoleh, biaya yang dikeluarkan, belanja, biaya transfer, pembiayaan, dan juga pengakuan pendapatan. Semetara basis akrual digunakan pada aset, kewajiban, dan ekuitas.
- 2) PSAP Nomor 02 mengenai Laporan Realisasi Anggaran
Informasi yang dapat diperoleh dari LRA adalah belanja, transfer, realisasi pendapatan, keuntungan/kerugian kemudian hal tersebut di diperbandingkan dengan anggaran yang sudah didapatkan dalam satu periode
- 3) PSAP Nomor 03 mengenai Laporan Arus Kas
Kas yang diterima dan dikeluarkan disajikan dalam Laporan Arus Kas dan dikelompokkan menurut biaya yang dikeluarkan, investasi berupa aset dan bukan keuangan, non anggaran, dan juga aktivitas operasi.
- 4) PSAP Nomor 04 mengenai Catatan Atas Laporan Keuangan
Semua laporan yang ada pada LRA, Laporan Arus Kas, dan juga Neraca harus terdapat informasi yang berhubungan dengan CALK. CALK ini harus disajikan secara runtut
- 5) PSAP Nomor 05 mengenai Akuntansi Persediaan
Apabila manfaat ekonomi untuk masa mendatang didapatkan dan biaya yang dikeluarkan dapat dihitung dan juga dibuktikan dan juga pada saat kepemilikan pindah tangan maka persediaan dapat diakui.
- 6) PSAP Nomor 06 mengenai Akuntansi Investasi Pengeluaran
Biaya yang dikeluarkan untuk hasil investasi jangka panjang akan dianggap pengeluaran pembiayaan sedangkan pendapatan dari investasi jangka pendek akan dianggap sebagai pengeluaran kas oleh pemerintah dan tidak dianggap belanja dalam LRA
- 7) PSAP Nomor 07 mengenai Akuntansi Aset Tetap
Biaya perolehan dapat menilai aset tetap namun apabila tidak memungkinkan maka bisa menggunakan nilai wajar pada saat perolehan. Sumbangan yang didapat dari aset tetap harus ditulis sesuai dengan nilai wajar pada saat perolehan
- 8) PSAP Nomor 08 mengenai Akuntansi Konstruksi
Apabila terdapat suatu benda berwujud pada saat pengerjaan maka benda tersebut harus dianggap konstruksi apabila terdapat banyak kemungkinan ada manfaat ekonomi di masa depan yang dihasilkan dari aset tersebut, masih dalam penggarapan, dan juga biaya perolehannya bisa dihitung dan dibuktikan.
- 9) PSAP Nomor 09 mengenai Akuntansi Kewajiban Pelaporan
Kewajiban harus disajikan dalam laporan keuangan yang bertujuan untuk umum apabila terdapat kemungkinan sumber daya ekonomi sudah dilaksanakan atau akan dilaksanakan supaya kewajiban yang ada terselesaikan, nilai penyelesaian terdapat pada perubahan atas kewajiban yang bisa diukur dan dibuktikan.
- 10) PSAP Nomor 10 mengenai Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa
Terdapat dua jenis kesalahan yaitu yang pertama ada kesalahan yang tidak di ulang dan yang kedua ada kesalahan yang terus menerus atau berulang. Kesalahan ini dilihat dari

sifat dan juga kejadiannya. Peristiwa luar biasa dapat berpengaruh terhadap hakikat dan jumlah dan juga harus dilaporkan ke dalam CALK secara terpisah. Di dalam CALK harus berisi pengungkapan mengenai perubahan apa sajakah dalam kebijakan akuntansi dan berpengaruh atau tidaknya kebijakan tersebut.

11) PSAP Nomor 11 mengenai Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan konsolidasi dipublikasikan satu periode dengan pelaporan keuangan entitas laporan tersebut berisi tentang jumlah yang lebih banyak dari pada periode sebelumnya. Laporan ini berisi LRA, CALK, dan juga neraca.

2.3. Indikator Standar Akuntansi Pemerintah

Terdapat beberapa indikator dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintah. Para anggota IKAPI menyatakan terdapat delapan indikator diantaranya yaitu :

- a. Basis yang digunakan yaitu basis akuntansi
- b. Penyajian dalam bentuk wajar
- c. Konsisten
- d. Mempunyai nilai historis
- e. Substansi melebihi bentuk formal
- f. Merealisasikan
- g. Kelengkapan yang dipublikasikan
- h. Periodisitas

2.4. Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah laporan yang tersusun tentang posisi keuangan dan transaksi yang dijalankan oleh entitas pelaporan merupakan pengertian laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintah. Menurut Septa (2018), Ketaatan pada saat mengelola, akuntabilitas, menginformasikan, merencanakan, dan berjalannya suatu organisasi dan juga keterkaitan antar masyarakat merupakan pengertian dari laporan keuangan. PP No 8 Th 2006 menjelaskan Laporan Keuangan ialah suatu tanggung jawab dalam mengelola negara atau daerah dalam suatu waktu.

Laporan yang tersusun tentang posisi keuangan dan juga transaksi yang dijalankan oleh entitas pelaporan merupakan pengertian laporan keuangan. Agar tujuan utama dari pelaporan keuangan terpenuhi maka disediakan laporan keuangan pemerintah. Terdapat empat kriteria mengenai laporan keuangan pemerintah yang baik diantaranya yaitu signifikan, meyakinkan, mudah dimengerti, dan juga bisa diperbandingkan hal tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Apabila laporan yang disediakan sudah benar dan sesuai dengan prinsip akuntansi maka laporan tersebut dapat disebut berkualitas. Tersedianya informasi yang bisa dimengerti dan juga untuk melengkapi kebutuhan para pengguna dalam menentukan sebuah keputusan merupakan definisi dari kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Putra, 2017).

Laporan Keuangan mempunyai tujuan untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan dan juga kinerja dan perubahan posisi keuangan yang berguna bagi para pemakai laporan tersebut. Penyampaian yang tersusun mengenai posisi keuangan suatu entitas akuntansi dan posisi keuangan merupakan pengertian Laporan Keuangan (Kartikahadi et al., 2016).

Laporan yang tersusun tentang transaksi dan posisi keuangan yang dijalankan oleh entitas pelaporan disebut Laporan Keuangan. Agar tujuan umum dari pelaporan keuangan terpenuhi maka Laporan Keuangan Pemerintah harus diberlakukan. Untuk membandingkan biaya yang dikeluarkan dengan anggaran yang sudah diberikan, membandingkan realisasi pendapatan, menilai apakah entitas pelaporan sudah efektif dan efisien maka laporan keuangan digunakan.

2.4. Tujuan Laporan Keuangan

Diberlakukannya laporan keuangan pada pemerintahan memiliki beberapa tujuan. Para ahli menyatakan ada beberapa tujuannya diantaranya yaitu:

Menurut Maith (2013), Laporan Keuangan dibuat untuk memberikan informasi tentang kinerja dan perubahan posisi keuangan, posisi keuangan yang memberikan manfaat bagi pemakai laporan keuangan tersebut dan juga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Menurut Barus et al. (2017), Tujuan dari laporan keuangan adalah agar hasil usaha yang dilakukan dapat diukur dari periode sekarang ke periode berikutnya supaya dapat dilihat apakah tujuan sudah tercapai atau belum. Sedangkan menurut Kasmir (2017), Laporan Keuangan bertujuan untuk memberikan informasi pada suatu periode tertentu. Secara lebih detail Kasmir (2017) menyatakan laporan keuangan memiliki beberapa tujuan diantaranya yaitu :

- a. Menginformasikan kepada perusahaan mengenai jenis dan juga jumlah aktiva yang saat ini dimiliki
- b. Menginformasikan kepada perusahaan mengenai jenis jumlah kewajiban dan juga modal yang dimiliki saat ini
- c. Menginformasikan pada perusahaan mengenai jenis dan jumlah pendapatan yang didapat dalam rentang waktu tertentu
- d. Menginformasikan kepada perusahaan mengenai jenis dan jumlah biaya yang harus perusahaan habiskan pada rentang waktu tertentu
- e. Menginformasikan kepada perusahaan mengenai perubahan yang biasa terjadi pada pasiva, aktiva, dan juga modal
- f. Menginformasikan pada perusahaan mengenai performa yang dilakukan oleh manajemen pada satu period
- g. Menginformasikan pada perusahaan mengenai catatan atas laporan keuangan

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari laporan keuangan yaitu untuk memberikan informasi secara jelas bagi para pemakai laporan keuangan tersebut.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *literature review* atau disebut dengan studi pustaka. Metode ini dilakukan dengan cara meneliti, meninjau, menguraikan, dan juga mengidentifikasi penelitian yang sudah ada. Peneliti melakukan pemeriksaan dan mengidentifikasi penelitian terdahulu secara runtut sesuai dengan langkah-langkah yang sudah dijelaskan (Triandini et al., 2019). Karya orisinal yang merangkum dan mensintesis penelitian sebelumnya tentang topik tertentu yang didefinisikan sebagai tinjauan pustaka (Ridwan et al., 2021). Tinjauan pustaka bertujuan untuk memberikan gambaran yang

mendalam tentang temuan yang sudah pernah dilaksanakan oleh orang lain (Suryanarayana et al., 2016). Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang berasal dari artikel ilmiah nasional yang bersumber dari google scholar.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Sebuah sistem dapat dinyatakan efektif apabila luaran yang dihasilkan sesuai dengan tujuan awal baik dari satu orang maupun kelompok. Tarigan & Nurtanzila (2013) menyatakan bahwa hubungan hasil yang diperoleh dari pusat tanggung jawab dan tujuan penerapan SAP merupakan penentu bahwa sistem tersebut efektif atau tidak SAP haruslah efektif dan efisien.

4.1.1. Efektif

Merupakan tujuan yang dapat dicapai atau menentukan tujuan yang tepat yang bersumber dari beberapa cara maupun pilihan. Standar akuntansi dibutuhkan supaya dalam menyusun laporan keuangan bisa lebih mudah, keselarasan dalam laporan keuangan, memudahkan auditor saat memeriksa dan juga pembaca lebih mudah laporan keuangan untuk dibandingkan dan diinterpretasikan. 4 (empat) SAK yang diterapkan di Indonesia:

- 1) PSAK-IFRS
- 2) SAK ETAP 3. PSAK Syariah
- 3) SAP

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia menerapkan PSAK IFRS dan SAK ETAP sedangkan PSAK syariah dibuat oleh Dewan Akuntansi Syariah sedangkan SAP oleh Komite SAP

4.1.2. Efisien

Hasil yang maksimal namun menggunakan sumber daya yang minimum. Efisien yaitu mencapai tujuan yang sudah ditentukan menggunakan cara yang paling baik agar tujuan tersebut dapat tercapai. Hasil yang diperoleh dari efisien dapat dilihat dari penilaian dan juga membandingkan masukan dan keluaran yang dihasilkan. SAP dapat dikatakan efektif apabila tujuan sesuai harapan. Tujuan dari penerapan SAP sendiri yaitu supaya laporan keuangan yang dihasilkan berkualitas baik pemerintah pusat maupun daerah agar laporan keuangan tersebut akuntabilitas dan transparansi.

4.2. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Laporan Keuangan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fadilah & Rianawati (2021) menunjukkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Laporan Keuangan. SAP menjadi rujukan dalam membuat laporan keuangan pemerintah. Agar laporan keuangan berkualitas maka SAP harus diterapkan. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati et al. (2018) yang menyatakan pendapat yang sama dengan penelitian sebelumnya yaitu SAP berpengaruh signifikan positif terhadap laporan keuangan apabila SAP diterapkan maka dapat menambah pemahaman dalam menyajikan laporan keuangan dan juga dapat mengambil langkah selanjutnya ketika terdapat suatu aset yang sudah Tidak dipergunakan kembali seperti yang sudah ditetapkan oleh SAP.

Penelitian yang dilakukan oleh Munira (2022) menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan. Pendapat tersebut menyatakan bahwa dinas pemerintahan yang sudah menerapkan SAP dengan baik maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan juga akan baik dan relevan bisa dibandingkan dan juga mudah dipahami.

Hasil penelitian Yanti & Made (2020) menjelaskan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap laporan keuangan. Pada saat menyusun laporan keuangan pemerintah membutuhkan SAP. Standar akuntansi yang sudah diberlakukan bisa dijalankan dengan menggunakan Standar Akuntansi Pemerintah, Supaya pemerintah tertata dan sesuai maka SAP harus diterapkan dan juga akan menghasilkan laporan keuangan yang relevan dan berkualitas. Apabila SAP diterapkan dengan baik maka hasil dari laporan keuangan juga akan semakin baik. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yanti & Made (2020) menyatakan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap laporan keuangan. Laporan Keuangan bisa dikatakan terpercaya apabila Standar Akuntansi Pemerintah diterapkan dan diatur sesuai dengan informasi yang dapat berguna bagi para pengguna. Diterapkannya Standar Akuntansi Pemerintah akan memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan akan sesuai dengan syarat yang ada.

4.3. Hubungan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Prinsip akuntansi yang ditetapkan pada saat menyajikan dan menyusun laporan keuangan pemerintah adalah Standar Akuntansi Pemerintah. Setyowati et al. (2016) menyatakan bahwa tidak adanya pengaruh yang signifikan dari penerapan SAP terhadap laporan keuangan yang dihasilkan. Hal tersebut tidak selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuliani & Agustini (2016) yang menyatakan bahwa penerapan SAP berpengaruh terhadap laporan keuangan yang dihasilkan. Dari penelitian yang dilakukan Mardiana & Fahlevi (2017) menyatakan bahwa pemahaman dalam menerapkan SAP berpengaruh signifikan positif terhadap penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah dan juga berpengaruh terhadap laporan keuangan yang dihasilkan.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan review yang sudah dilakukan oleh penulis menjelaskan bahwasanya Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh terhadap laporan keuangan yang dihasilkan. Standar Akuntansi Pemerintah membuktikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan yang ada. Standar Akuntansi Pemerintah adalah standar yang dapat membuktikan bahwasanya laporan tersebut dibuat sesuai dengan ketentuan dan informasi keuangan dan sangat berguna bagi para pembacanya. Informasi ini dapat dikatakan berguna apabila informasi tersebut adalah indikator laporan keuangan memenuhi kualifikasi informasi.

Variabel variabel lain dapat diteliti lagi pada penelitian selanjutnya variabel tersebut tentunya memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Sumber yang digunakan lebih banyak lagi dikemukakan sumber pada penelitian ini terbatas dan juga bisa melakukan penelitian langsung di lapangan supaya dapat mengetahui kondisi sesungguhnya bisa dengan melakukan penyebaran kuesioner terhadap beberapa responden.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad, I., Mustanir, A., & Ramadhan, M. R. (2017). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Enrekang. *Sosial Politik & Ekonomi*, 7(1), 89–103.
- Antoni, E. (2014). *Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Survey Pada Pemerintah Kabupaten Di Seluruh Jawa Barat*.
- Barus, M. A., Sudjana, N., & Sulasmiyati, S. (2017). Penggunaan rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan (studi pada PT. Astra Otoparts, Tbk dan PT. Goodyer Indonesia, Tbk yang go public di bursa efek indonesia). *Jurnal Administrasi Bisnis S1 Universitas Brawijaya*, 44(1).
- Fadilah, F. U., & Rianawati, T. (2021). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kualitas Aparatur Pemerintahan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Kota Semarang. *Jurnal Visi Manajemen*, 6(3), 1103–1114.
- Hartanto, T. (2022). Analysis Of Local Government Financial Statements (LKPD) In Order To Improve The Quality Of Governance And The Achievement Of Development Outcomes In South Sulawesi. *Journal Of Management, Accounting, General Finance And International Economic Issues (Marginal)*, 2(1), 375–383.
- Kartikahadi, H., Sinaga, R. U., Syamsul, M., Siregar, S. V., & Wahyuni, E. T. (2016). Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis SAK Berbasis IFRS Buku 1. *Salemba Empat*.
- Kasmir. (2017). *Analisis Laporan Keuangan*. Raja Grafindo Persada.
- Langelo, F., Saerang, D. P. E., & Alexander, S. W. (2015). Analisis penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dalam penyajian laporan keuangan pada pemerintah kota bitung. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(1).
- Maith, H. A. (2013). Analisis Laporan Keuangan dalam Mengukur Kinerja Keuangan pada PT. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3).
- Mardiana, R., & Fahlevi, H. (2017). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pengendalian Internal dan Efektivitas Penerapan Sap Berbasis Akrual terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada Satuan Perangkat Kerja Kota Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 2(2), 30–38.
- Munira, H. (2022). Analisis Dampak Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah, Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (DPKAD) Pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Dan Bisnis [JIMEIS]*, 2(2), 1–11.
- Putra, R. D. (2017). *Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi (Sia) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Kabupaten Cianjur (Studi Kasus Pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur)*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas Bandung.
- Rahmawati, A., Mustika, I. W., & Eka, L. H. (2018). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi*, 20(2).
- Ridwan, M., Suhar, A. M., Ulum, B., & Muhammad, F. (2021). Pentingnya Penerapan

- Literature Review pada Penelitian Ilmiah. *Jurnal Masohi*, 2(1), 42–51.
- Septa, P. (2018). *Pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan kabupaten ponorogo*. Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Setyowati, L., Isthika, W., & Pratiwi, R. D. (2016). Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang. *Kinerja*, 20(2), 179–191.
- Suryanarayana, T. M. V, Mistry, P. B., Suryanarayana, T. M. V, & Mistry, P. B. (2016). Review of literature. *Principal Component Regression for Crop Yield Estimation*, 27–37.
- Tarigan, E. P. A., & Nurtanzila, L. (2013). Standar akuntansi pemerintahan dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 17(1), 29–45.
- Triandini, E., Jayanatha, S., Indrawan, A., Putra, G. W., & Iswara, B. (2019). Metode systematic literature review untuk identifikasi platform dan metode pengembangan sistem informasi di Indonesia. *Indonesian Journal of Information Systems*, 1(2), 63–77.
- Yanti, N. S., & Made, A. (2020). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Dan Pengawasan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 8(1).
- Yuliani, N. L., & Agustini, R. D. (2016). Faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi*, 14(1), 56–64.